

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, kerja sama antar negara merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk dari upaya tersebut adalah memberlakukan kegiatan perdagangan yang berbasis perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Upaya menunjang perdagangan internasional dapat dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan cara ikut serta dalam perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh institusi-institusi perdagangan seperti WTO maupun dengan berbagai subjek hukum internasional baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral.

Pada awal mula berkembangnya perdagangan internasional, perdagangan hanya dilakukan oleh berbagai negara yang sifatnya sederhana dan cenderung berlangsung secara bilateral maupun regional yang didasarkan pada kedekatan geografis. Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi, hubungan perdagangan antar negara kemudian menjadi semakin kompleks dilihat dari adanya berbagai proses transaksi yang berlangsung dengan cepat, serta terjadinya persaingan

dagang yang meluas tidak hanya dari sektor barang maupun jasa. Hal ini akhirnya memicu adanya kesadaran bersama antar pelaku dalam perdagangan internasional bahwa kerjasama dalam bidang perdagangan dinilai penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan cara bilateral, regional maupun global mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan sama sekali hambatan-hambatan perdagangan, tariff maupun non tariff untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif, dan progresif.

Seiring berjalannya waktu, negara-negara semakin memahami arti pasar bebas serta manfaat-manfaat yang diperoleh dari mekanisme perdagangan tersebut. Keberadaan perdagangan bebas memiliki berbagai tujuan seperti, untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara yang terlibat, serta harapan untuk dapat menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil yang saling menguntungkan, serta untuk menarik investor agar menanamkan investasi dalam negeri, dan meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia.¹

Keberadaan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) merupakan kekuatan politik dan ekonomi pada wilayah Internasional khususnya wilayah Asia pasifik. ASEAN adalah Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, Sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang

¹ Akmal jamil. "Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, (JKAF) UGM, Vol.2, hal.2

dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Piagam aslinya terhitung lima anggota Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian Negara lainya bergabung diantaranya Myanmar tahun 1995, Laos tahun 1997, dan Kamboja tahun 1999.²

ASEAN didirikan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan bersama diwilayah tersebut, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan budaya, perdamaian dan stabilitas regional. Sejalan dengan tujuan tersebut, para pimpinan organisasi mendirikan tiga “pilar” tata kelola pada tahun 2003 yaitu Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas social budaya ASEAN.³

Adapun tujuan ASEAN dalam bidang ekonomi yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah bersama dalam bidang ekonomi, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan, pengkajian masalah-masalah komoditi.

² www.asean.org

³ *ibid* hal 1

Untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tersebut, maka negara anggota ASEAN memberlakukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) . Zona perdagangan bebas AFTA ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak lagi *Foreign Direct Investment*, dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*) yang dilakukan dengan melakukan berbagai pengurangan hambatan perdagangan seperti pengurangan tarif terhadap berbagai komoditas.

Pada dasarnya ke sepuluh Negara ASEAN ini memiliki tingkat ekonomi, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang berbeda. Hal inilah yang mendasari ASEAN pada akhirnya membentuk AFTA pada tahun 1992, dengan penurunan tarif perdagangan hingga mencapai 0-5% pada tahun 2002.

Seiring perkembangan zaman ASEAN ingin mengembangkan pasar internasionalnya melalui berbagai kerjasama dibidang perdagangan . ASEAN juga membentuk *Free Trade Area* (FTA) secara bilateral dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN yaitu kawasan Asia Khususnya Asia Timur seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan. Diantara ketiga negara tersebut, Cina lah yang menjadi sorotan utama ASEAN dalam penerapan perdagangan bebas.

ASEAN melakukan kerjasama dengan Cina dengan melihat potensi perdagangan pada Cina. Karena Cina merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi

dunia yang telah menjadi mitra dagang terpenting ASEAN dari tahun ke tahun. Dengan pertimbangan inilah ASEAN akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Cina dalam bidang perdagangan dengan harapan bahwa kekuatan ekonomi Cina bisa memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dan nantinya juga akan membuat perekonomian di negara-negara anggota ASEAN ikut berkembang.

ASEAN dan Cina pada 4 november 2002 membuat kesepakatan dan melakukan kerjasama dalam perdagangan bebas yang dikenal sebagai ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*). ACFTA merupakan bentuk kesepakatan negara-negara ASEAN dengan Cina yang dibentuk untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan barang baik tariff maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina.

ACFTA ditandatangani di Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002 yang keikutsertaan Indonesia ditandai dengan ratifikasi Indonesia dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* yang ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara ASEAN dan Indonesia diwakili oleh Presiden

Megawati Soekarno Putri.⁴ Kemudian Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007, serta Persetujuan Investasi ASEAN dan Cina ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Yang diberlakukan pada 1 Januari 2010 dan di Indonesia sendiri Perjanjian ACFTA telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPRES No.48 tahun 2004 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010.

Sejak diberlakukannya ACFTA di Indonesia, ternyata Indonesia kurang mendapatkan keuntungan dibidang perdagangan, diantaranya Cina menguasai pasar dalam negeri yang mengakibatkan produk Cina membanjiri produk dalam negeri. Kasus tersebut terjadi karena ketidaksiapan pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA. Namun Indonesia sendiri tetap memaksa tetap masuk dalam ACFTA dengan melakukan berbagai strategi dalam ACFTA demi mengurangi dan menghindari dampak negatif ACFTA dari pasar dan produk dalam negeri diantaranya dengan meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri melalui peningkatan pemberlakuan sejumlah instrumen yang sesuai dengan disiplin perjanjian internasional, Standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta mencegah dumping dan lain-lain, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerbitan dan

⁴ Nugraha, Andri Gilang. *"Tantangan dan Peluang serta Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)."* Buletin KPI edisi-02, KPI, 2010. Hal 2

pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor, melakukan penguatan pasar ekspor, peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri dan penanganan issue domestik lainnya, seperti pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrastruktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, dll.⁵

Namun pada kenyataannya melihat kemungkinan kecil Indonesia dapat bersaing dengan Cina dalam perdagangan bebas tetapi pemerintah Indonesia sendiri tetap bersikeras ingin masuk dalam ACFTA yang sehingga memunculkan pertanyaan baru tentang Indonesia yang tetap bersikeras bertahan mengikuti ACFTA ditengah ketidaksiapan Indonesia menghadapi ACFTA.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang “**Alasan Indonesia Tetap Bergabung Dalam ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area)**”:

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu “*Mengapa Indonesia tetap bertahan untuk masuk dalam ACFTA?*”

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis digunakan untuk mempermudah penulis menjawab permasalahan yang ada. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵ [http: www.kemendag.go.id/Economic/ACFTA/kebijakan-indonesia](http://www.kemendag.go.id/Economic/ACFTA/kebijakan-indonesia). Diakses pada tanggal 4 oktober 2015

Teori Aktor Rasional. Menurut Graham T Allison inti dari teori Aktor Rasional adalah sebagai berikut:⁶

- Proses pengambilan keputusan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh aktor yang paling dominan, yakni pimpinan negara tersebut seperti presiden
- Menurut teori ini, proses pengambilan keputusan luar negeri diambil berdasarkan hal-hal yang bersifat rasional, berdasarkan akal pikiran dengan mempertimbangkan kalkulasi untung rugi.
- Keputusan luar negeri yang ditetapkan merupakan proses yang cermat, melalui proses deliberasi yang panjang dan memperhitungkan semua aspek yang ada sehingga dapat dilihat apakah keputusan tersebut menguntungkan atau tidak.
- Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan maka seorang aktor membuat sejumlah alternatif keputusan untuk dipilah, dihitung dan ditimbang secara cermat sehingga bisa dipilih mana yang paling rasional.

Dalam masa pemerintahannya, Presiden Jokowi memunculkan kembali Visi Trisakti. Trisakti memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermatabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berkari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Upaya untuk mewujudkan visi terwujudnya Trisakti Indonesia

⁶ Allison, Graham T. *Essence of Decision " Explaining The Cuban Missile Crisis"*. Boston: Little, Brown and Company. 1971

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dilakukan Jokowi dengan berlandaskan gotong royong. Upaya tersebut akan ditempuh dengan misi sebagai berikut:⁷

1. Mewujudkan keamanan sosial yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam masa pemerintahan Jokowi, Jokowi mengambil isu utama yaitu bidang ekonomi.⁸ Maka sejalan dengan visi dan misinya untuk memerintah Indonesia Jokowi

⁷Pellokila, Jappy "Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian (Visi misi dan program aksi) Jokowi-JK 2014", Jakarta Mei 2014

<http://www.opajappy.com>

tetap bertahan dalam ACFTA, alasan lain hubungan kemitraan Indonesia dengan Cina dijalin sejak lama, dan keputusan Presiden Jokowi untuk bertahannya Indonesia dalam ACFTA dilakukan juga dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian. Diantaranya sebagai berikut :

Keikutsertaan ACFTA diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena kegiatan ekspor Indonesia dapat meningkat karena adanya kemudahan kemudahan Indonesia yaitu pengurangan tarrif maupun non tarrif dalam ACFTA, Meningkatkan devisa negara dari penanaman modal dan Investasi Asing dari negara anggota ACFTA lainnya terutama Cina, dengan peningkatan perekonomian Indonesia juga akan berdampak baik pada aspek lain seperti pendidikan, pariwisata, budaya, ACFTA juga dapat digunakan Indonesia sebagai sarana transfer teknologi, keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dan negara Cina sehingga Indonesia memperoleh kemudahan untuk bekerjasama dengan negara anggota ASEAN lainya bukan hanya disektor ekonomi namun politik dan budaya dll. Selain itu keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA juga dapat dijadikan sarana eksistensi Indonesia didunia internasional terutama dengan negara anggota ASEAN lainya dan Cina.⁹ Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa bertahannya Indonesia

⁸*Ibid*

⁹ *framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China.*

dalam ACFTA pasti akan menimbulkan kerugian dalam persaingan pasar diantaranya pasar dalam negeri akan dikuasai produk dari negara Cina jika pemerintah Indonesia tidak memperbaiki kebijakannya dalam ACFTA yang akan berdampak buruk pada para pelaku usaha dalam negeri dan imbasnya juga akan berdampak pada pendapat negara yang menurun. Dari pertimbangan keuntungan dan kerugian keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA maka presiden memutuskan untuk tetap bertahan dalam keanggotaannya dalam ACFTA.

D. Hipotesis

Indonesia bertahan untuk masuk dalam ACFTA meski Indonesia belum siap untuk bersaing dengan negara Cina karena adanya alasan, sebagai berikut :

Dari sisi ekonomi adanya ACFTA akan memberikan dampak positif dan kemudahan berupa keleluasaan barang dan jasa yang berasal dari Indonesia untuk masuk dalam pasar China dan kebijakan ini diharapkan mampu membuat kedua belah pihak dapat menjalin kerja sama yang lebih luas seperti dalam bidang sosial, IPTEK, pendidikan maupun pariwisata.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui Keikutsertaan Indonesia Bergabung dalam ACFTA.

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dengan bukti data dan fakta yang ada, serta dilanjutkan dengan hipotesa dengan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut.
3. Untuk memberi pemahaman penulis dan pembaca terhadap informasi khususnya dalam Keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, adapun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu Penulis dan pembaca mendapatkan pemahaman terhadap informasi khususnya dalam Keikutsertaan Indonesia Bergabung dalam ACFTA.

G. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan sistem metodologi yang baik. Pembahasan kajian ini menggunakan cara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini, Penulis melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data-data sekunder atau informasi dari berbagai media cetak seperti, melalui buku, jurnal, dan media elektronik seperti internet, laporan website, dokumentasi lembaga yang terkait untuk mendukung kelengkapan data dalam proses penyelesaian penelitian ini.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan penelitian dan upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu meluas dan semakin kabur maka dalam hal ini penulis memberikan batasan penelitian, terutama dalam jangkauan waktu dari data yang digunakan yaitu adanya ASEAN dan Sebelum serta sesudah pemberlakuan ACFTA di Indonesia.

Namun pada penelitian ini lebih difokuskan pada Keikutsertaan Indonesia Berabung dalam ACFTA. Dalam mendukung penelitian ini, jangkauan di luar adanya Keanggotaan Indonesia dalam ACFTA akan dibahas karena masih terdapat keterkaitan dan korelevanan dengan tema penelitian yang akan dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, agar penulisan lebih terarah dan teratur, maka penulis merasa sangat perlu memberikan sistematika penulisan. Penulis akan membagi pembahasan dalam lima bab, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan terakhir Jangkauan Penelitian.
- Bab II Pada bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran Tentang ACFTA yang terdiri dari : Sejarah ACFTA yang menjelaskan tentang Latar belakang terbentuknya ACFTA dan Prinsip dan Tujuan ACFTA serta Bagaimana Indonesia bergabung dalam ACFTA yang menjelaskan tentang Sejarah Indonesia bergabung dalam ACFTA dan Tujuan Indonesia bergabung dalam ACFTA.
- Bab III Pada bab ini penulis akan membahas tentang Kondisi Indonesia Sebelum Masuk dalam ACFTA dan Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Cina dalam Aspek Ekonomi, Aspek Politik dan Aspek Sosial dan Budaya.
- Bab IV Pada bab ini berisi tentang penjelasan Faktor yang mempengaruhi Indonesia Masuk dan Tetap Bertahan dalam ACFTA diantaranya untuk Mengembangkan Perekonomian dan Mengembangkan Pariwisata.

Bab V Pada bab ini berisi Penutup/ Kesimpulan, berisi ringkasan singkat penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.